

**PERAN LAPAS KELAS 1 MAKASSAR DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN
NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA PERSIAPAN KERJA PASCA
PEMBINAAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYYAH**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar (SH)

Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tata Negara

Pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ANDI NUR MAYAPADA

NIM 10200116001

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andi Nur Mayapada

Nim : 10200116001

Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba, 03 Januari 1999

Jur/Prodi/Konsentrasi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Alamat : BTN Minasaupa Blok J11 No 19

Judul : Peran Lapas kelas 1 Makassar Dalam Upaya Pemberdayaan Narapidana Sebagai Upaya Persiapan Kerja Pasca Pembinaan Perspektif Siyasah Syar'iyah.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 06 Juli 2020

Penyusun

Andi Nur Mayapada

NIM. 10200116001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Peran Lapas kelas 1 Makassar Dalam Upaya Pemberdayaan Narapidana Sebagai Upaya Persiapan Kerja Pasca Pembinaan Perspektif Siyash Syar’iyyah.”**. Yang disusun oleh Andi Nur Mayapada, NIM 10200116001, mahasiswa jurusan Hukum Tatanegara (*Siyash Syar’iyyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertanggungjawabkan pada sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 05 November 2020, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Makassar, 05 November 2020 M

19 Rabiul Awal 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. H. Muhammad Bakry, Lc., M.Ag	()
Sekretaris	: Dr. Marilang, S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hamzah, M.H.I	()
Pembimbing II	: Dr. Nila Sastrawati, M.Si	()
Penguji I	: Prof. Hj. Siti Aisyah, M.A., Ph.D.	()
Penguji II	: Drs. H.M. Gazali Suyuti, M.H.I	()

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar



Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag

NIP: 197311222000121002

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum. Wr. Wb

Segala puji hanyalah milik Allah swt, karena atas segala nikmat baik berupa rahmat maupun karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Salam dan salawat semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, para sahabat serta kerabat beliau, dan juga ummatnya yang senantiasa bersama Rasulullah membawa risalah Allah Swt, sebagai junjungan yang menjadi suri tauladan terhadap seluruh umat manusia dan membawa dunia dari zaman yang gelap gulita menuju jalan yang dipenuhi cahaya karena syafaat yang diberikan kepada seluruh umat manusia.

Kebesaran jiwa, cinta dan kasih sayang yang begitu besar serta doa yang selalu tercurahkan dari kedua orang tua, saudara dan saudari tercinta, Ayahanda **Andi Ahmad Patta, S.Sos**, Ibunda **Andi Sayati**, serta Kakak **Andi Muh. Afdhal Patta S.Pd**, **Andi Muh. Mahfudz Patta S.Pd**, **Andi Bissupatinnah Patta, S.Pd** serta Adik **Andi Mustika Salkin** yang senantiasa memberikan doa dan dukungan, juga nasihat, serta bimbingan secara penuh hingga sampai pada saat ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) sekaligus penyelesaian akhir studi (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Disadari betul bahwa sebagai bagian dari seluruh makhluk Tuhan yang *dhaif* yang sudah pasti secara sosial sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, terasa sangat bijaksana bila dihaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada sederetan hamba Allah yang telah memberikan sumbangsih baik berupa

bimbingan, dorongan, dan bantuan sehingga kiranya dicatat oleh Allah Swt sebagai amal saleh. Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga selesainya penulisan skripsi ini, dan kepada yang terhormat:

1. Bapak **Prof. Drs. Hamdan Juhanis, M.A, Ph.D** selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak **Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya.
3. Ibunda **Dr. Kurniati, M.H.I** selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara UIN Alauddin Makassar dan ibunda **Dr. Rahmiati, S.Pd., M.Pd** selaku sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak **Dr. Hamzah Hasan, M.H.I** selaku Pembimbing I dan Ibunda **Dr. Nila Sastrawati, M.Si** selaku Pembimbing II. Beliau ditengah kesibukannya bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk senantiasa memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibunda **Prof. Hj. Siti Aisyah, M. A., Ph.D.** selaku Penguji I dan Bapak **Drs. H. M. Gazali Suyuti, M. H. I.** selaku Penguji II.
6. Seluruh **dosen jurusan Hukum Tata Negara UIN Alauddin Makassar** yang telah memberikan seluruh ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat, juga kepada seluruh **staf Jurusan Hukum Tata Negara** serta **staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar** yang sudah banyak membantu selama proses pengurusan berkas dan ujian sarjana.
7. Kepala **Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar** beserta seluruh jajarannya, dan para penghuni Lapas yang telah memberikan izin, bantuan, dan kemudahan kepada Penulis dalam melakukan penelitian. Terkhusus kepada **Pak**

Chie Poer, Pak Rama, Pak Rusdi, Pak Surya, Pak Jawa, Ibu Martha, Ibu Dian, Ibu Sira, Pak Pahrudin, Ibu Idar, terima kasih atas bimbingannya sejak melaksanakan PPL Profesi Hukum (Juli- Agustus 2019) dan juga melaksanakan penelitian.

8. Keluarga yang telah memberikan banyak sumbangsih berupa doa, dukungan maupun materi, **A. Muh.Nur, Andi Darnah, S.Pd, A. Rukmiati, A. Supriadi, S.E., A. Ferawati, S.Pd, Andi Irfan, Wiwik Hendrawati, S.Hut, Muh. Jafar Dg. Mattinri, B.A., St. Karaminang Opu Kontu, Merfalina Dewi, S.KM, M.Kes, Pratiwi Risnaeni, S.Pd, Hamra Asri, S.Pd.I, Ramlina, S.Pd.I, Andi Sahabuddin, S.Kom, Andi Alang Achmad, S.Pd.I,** dan keponakan ku tercinta **Andi Fahriza Abqary** serta semua keluarga yang tidak dapat disebutkan, terima kasih atas dukungannya.
9. Sahabat-sahabat, **Khusnul Khatimah Sunardi, Andi Arvenia Tri Ramadhani Arasti, Devi Adelia Mutia, Afrah As Shaliha, Muh. Albar Ali, Ismail Ramdani, Darmawati, Sariana Asri, Wahdaniah, Andi Istifani, Nur Annisa** terima kasih atas kebersamaan dan kebahagiaannya selama ini.
10. Orang tua sahabat-sahabat, **Mama Bapak Khusnul (Om Taba dan Tante Hasnah), Mama Papa Devi (Om Manaf dan Mama Devi), Mama Bapak Afrah, Mama Bapak Darma,** terima kasih selalu menerima ketika berkunjung ke rumahnya.
11. Kawan-kawan seperjuangan, **Muawwamatul Khaeria Al-Jaros, Aswinda, Reri Anggraini, Nursyamsi, Muammar Salam, Andri, Andi Muh. Teguh Hakim,** serta seluruh saudara ku di **HTN A 2016** dan juga keluarga besar HTN khususnya teman-teman HTN Angkatan 2016.

12. Keluarga Besar **Alauddin Debate Association**, terima kasih untuk ilmu, pengalaman dan kebersamaannya.
13. Teman-teman KKN di Kelurahan Lembang Gantarangkeke, Kec. Tompubulu, Kab. Bantaeng. **Ahmad Baidhawry R, Nurul Pratiwi Saputri, Annizha Reski, Annisa Resky A. Torki, Khaerul Ibrahim, Azwar Dwi Junardi, Nur Ardia Waris, Mulindah, Muh. Nur Ihsan** yang memberi keceriaan dan selalu setia bersama dalam suka maupun duka selama ber-KKN
14. Keluarga besar **OGM Smansa Bulukumba**, terima kasih atas support dan kebersamaannya selama ini.
15. Semua pihak yang berkontribusi atas penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Tidak disebutkan bukan berarti mengurangi rasa hormat pada kalian.

Dan akhirnya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan sumbangsi yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhir kata, diharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca sekalian.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 06 Juli 2020

Penyusun,

Andi Nur Mayapada

NIM: 10200116001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	10
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	12
C. Rumusan masalah.....	12
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	15
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Pemberdayaan Narapidana.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Upaya Persiapan Kerja.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan.....	31
D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	42
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Sumber Data.....	44
D. Metode Pengumpulan Data Penelitian.....	44
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	46
G. Pengujian Keabsahan Data.....	47
BAB IV PEMBERDAYAAN NARAPIDANA DI LAPAS KELAS 1 MAKASSAR SEBAGAI UPAYA PERSIAPAN KERJA PASCA PEMBINAAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
B. Urgensi Pemberdayaan Narapidana Sebagai Upaya Persiapan Kerja Pasca Pembinaan di Lapas Kelas 1 Makassar.....	57
C. Bentuk Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas 1 Makassar.....	66
D. Hambatan dalam pemberdayaan narapidana sebagai upaya persiapan kerja pasca pembinaan di Lapas Kelas 1 Makassar.....	69
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	71
B. Implikasi Penelitian.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75

LAMPIRAN.....	79
RIWAYAT HIDUP.....	82



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ع	„ain	„	apostrof terbalik
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika ia terletak ditengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab. yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
و	<i>ḍammah</i>	U	U

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i> an <i>yā</i> ''	Ai	a dan i
أ و	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...إ...أ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i> ''	Ā	a dan garis di atas
أ	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i> ''	I	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ل) alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan translasi huruf hamzah menjadi opostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah

lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-*Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partake huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafz *al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).



ABSTRAK

Nama : Andi Nur Mayapada

Nim : 10200116001

Judul :Peran Lapas kelas 1 Makassar Dalam Upaya Pemberdayaan Narapidana Sebagai Upaya Persiapan Kerja Pasca Pembinaan Perspektif Siyasah Syar'iyah.

Pokok permasalahan yang mmenjadi kajian utama dari penelitian ini adalah bagaimana Peran Lapas kelas 1 Makassar Dalam Upaya Pemberdayaan Narapidana Sebagai Upaya Persiapan Kerja Pasca Pembinaan Perspektif Siyasah Syar'iyah. Dari pokok masalah tersebut, ditarik sub masalah yaitu:1) Bagaimana urgensi pemberdayaan narapidana melalui pembinaan sebagai upaya persiapan kerja di Lapas Kelas 1 Makassar ? 2) Bagaimana bentuk pemberdayaan narapidana sebagai upaya persiapan kerja pasca pembinaan di Lapas Kelas 1 Makassar? 3) Apa hambatan dalam proses pembinaan di Lapas Kelas 1 Makassar?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field kualitatif research*. Sedangkan pengumpulan data menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui literatur-literatur dan artikel yang relevan dengan penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Pembinaan narapidana sebagai bentuk pemberdayaan selama menjalani masa pidana sangat penting dan berguna karena akan meningkatkan potensi diri dan kemandiriannya sebagai persiapannya ketika akan kembali ke masyarakat. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi penghormatan kepada sesama manusia pun mendukung adanya perlakuan baik kepada manusia meskipun ia seorang narapidana 2) Bentuk pembinaan di Lapas kelas 1 Makassar terdiri atas pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang disesuaikan dengan minat dan bakat narapidana. 3) Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas 1 Makassar lebih kepada kurangnya tenaga pendidik untuk PKBM dan kemauan narapidana untuk mengikuti pembinaan yang masih kurang.

Implikasi dari Penelitian ini, yaitu 1) Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar lebih mempromosikan secara massif segala produk-produk yang dihasilkan dari pembinaan oleh Lapas kelas 1 Makassar sehingga dapat bersaing dan diperhitungkan oleh masyarakat luar Lapas. 2) Pelaksanaan program pembinaan agar lebih kreatif dan inovatif agar pembinaan tersebut berjalan efektif dari sebelumnya serta dapat lebih meningkatkan minat warga binaan untuk mengikuti rangkaian kegiatan.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan masyarakat akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹

Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah Negara melalui aparaturnya. Prinsip manusia adalah Negara melalui aparaturnya. Prinsip ini ditulis di seluruh konvensi dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestik.² Hak konstitusional warga Negara hanya berlaku bagi orang yang berstatus sebagai warga negara, sedangkan bagi orang

¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003), h.77

²Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 31

asing tidak dijamin.³ Sekarang, setelah Perubahan Kedua UUD 1945 pada 2000, ketentuan mengenai hak asasi manusia dan hak-hak warga Negara dalam UUD 1945 telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Materi yang semula hanya berisi tujuh butir ketentuan yang juga tidak seluruhnya dapat disebut sebagai jaminan konstitusional hak asasi manusia, sekarang telah bertambah secara sangat signifikan. Ketentuan baru yang diadopsikan ke dalam UUD 1945 setelah Perubahan Kedua pada tahun 2000 termuat dalam Pasal 28A sampai dengan 28J, ditambah beberapa ketentuan lainnya yang tersebar di beberapa pasal.

Oleh karena itu, perumusan tentang hak-hak asasi manusia dalam konstitusi Republik Indonesia dapat dikatakan sangat lengkap dan menjadikan UUD 1945 sebagai salah satu undang-undang dasar yang paling lengkap memuat ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.⁴ Hak Asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperolehnya dan dibawanya bersama dengan kelahiran atau kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak asasi manusia (*human right*) yang secara universal diartikan sebagai “*those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being*”. Masyarakat di dunia perumusan dan pengakuannya telah diperjuangkan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Bahkan saat ini hal tersebut masih berlangsung dengan berbagai dimensi permasalahan yang muncul karena berbagai spektrum penafsiran. Negara Kesatuan

³Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 353

⁴Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, h. 361

Republik Indonesia (NKRI) membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea keempat, bahwa negara bertujuan untuk mensejahterakan kepentingan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud bukan hanya masyarakat yang bebas saja, namun juga termasuk masyarakat yang kemerdekaannya terampas akibat melakukan pelanggaran pelanggaran atau melanggar hukum (narapidana).⁵

Pada dasarnya, semua Rasul dan Nabi Allah adalah pejuang-pejuang penegak hak asasi manusia yang paling gigih. Mereka tidak hanya sekedar membawa serangkaian pernyataan akan hak-hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam Kitab-kitab suci, seperti Zabur, Taurat, Injil dan al-Quran, akan tetapi sekaligus memperjuangkannya dengan penuh kesungguhan dan pengorbanan. Dalam hubungan dengan HAM, dari ajaran pokok tentang *hablum min Allah* dan *hablum min na-nas*, muncul dua konsep hak, yakni hak manusia (*haq al-insan*) dan hak Allah. Setiap hak saling melandasi satu sama lain. Hak Allah melandasi hak manusia dan juga sebaliknya. Konsep Islam mengenai kehidupan manusia ini didasarkan pada pendekatan teorisentris atau yang menempatkan Allah melalui ketentuan syari'at-Nya sebagai tolok ukur tentang baik buruk tatanan kehidupan manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat atau warga negara.

Islam adalah agama yang terbit di tengah kehidupan yang tenggelam dalam tradisi buruk tersebut. Meskipun demikian, agama ini menentang keras dan

⁵Hana Mujahidah, "Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi* (Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019), h.3

memerangi tradisi pemaksaan dan penistaan terhadap kebebasan tersebut. Islam menegaskan bahwa pengangguran dan eksploitasi sama buruknya dan tidak manusiawi.⁶ Bila ditelusuri lebih jauh istilah HAM memang tidak disebutkan secara tersurat dalam al-Quran, akan tetapi bila dilihat dari perspektif makna dan orientasinya dalam al-Quran terdapat banyak istilah yang mengarahkan kita pada pengertian Ham. Menurut Said Aqil Siroj bahwa HAM dalam perspektif Islam dikenal dengan sebutan *al'adl* (keadilan). *Al-adl* berarti keseimbangan, harmoni dan keselarasan. Esensi agama Islam adalah terciptanya keadilan. Dan umat Islam disorong untuk menegakkan keadilan.⁷ Keadilan penting bagi kehidupan manusia demi terciptanya penghormatan dan hak-hak yang layak sesuai dengan aktifitasnya sesuai dengan QS al-Hadid /57: 25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.⁸

⁶ Zainul Abidin Qurbani, *Islam Hak Asasi Manusia Sebuah Kajian Komprehensif*, h. 237-238

⁷ Jahada, "Hak Asasi Manusia Menurut Al-Quran", *Jurnal Al-Adl* 6, No.1 9 (Januari 2013): h.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran Departemen Agama RI, 1980), h. 904

Asbabunnuzul Ayat:

Dalam ayat ini Allah swt mengabarkan kepada kita semua bahwa Allah telah mengutus beberapa Rasul untuk menyampaikan risalahnya dengan berbagai kemampuan dan bukti nyata (mukjizat), yang membuktikan bahwa para Rasul adalah manusia yang dipilih Allah untuk menyebarkan risalah-Nya, dalam hal ini Allah swt menjelaskan telah menjadikan besi bagi kemanfaatan manusia dan dijadikan sebagai bukti bahwa Allah yang berkehendak atas segala sesuatu. Allah swt mengutus para rasul disertai dengan kitab dimana didalamnya terdapat tentang ajaran-ajaran yang harus disampaikan oleh para Rasul kepada umatnya, diantaranya kitab-kitab itu yakni Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab sebelumnya dan menjadi dasar untuk menegakkan neraca keadilan atau sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan atas berbagai permasalahan.

Dan juga setiap Rasul tersebut bertugas untuk menyampaikan agama Allah kepada umatnya. Ajaran agama itu adakalanya tertulis dalam sahifah-sahifah dan adakalanya termuat dalam suatu kitab seperti Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Ajaran agama itu berupa petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sebagai dasar mengatur dan membina masyarakat, maka setiap agama yang dibawa oleh para Rasul itu mempunyai asas “keadilan”. Keadilan ini wajib ditegakkan oleh para rasul dan pengikut-pengikutnya dalam masyarakat, yaitu keadilan penguasa terhadap rakyatnya, keadilan suami sebagai kepala rumah tangga, keadilan pemimpin atas yang dipimpinnya dan sebagainya, sehingga seluruh anggota masyarakat sama kedudukannya dalam hukum, sikap dan perlakuan.

Islam juga mengajarkan pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia, karena Islam sebagai agama yang membebaskan dan memanusiakan manusia, hal itu tercermin dalam QS al-Hujurat/ 49:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁹

Asbabunnuzul Ayat:

Abu Daud meriwayatkan tentang asbabun nuzul Surat Al-hujurat ayat 13 ini. Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Hind yang profesinya adalah seorang pembekam. Rasulullah meminta kepada Bani bayadhah untuk menikahkan seorang putri mereka dengan Abu Hind, namun mereka enggan dengan alasan Abu Hind adalah bekas budak mereka. Sikap ini keliru dan dikecam Al-Quran dengan turunnya ayat ini. Bahwa kemuliaan di sisi Allah bukanlah karena keturunan atau garis kebangsawanan melainkan karena ketaqwaan.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran Departemen Agama RI, 1980), h. 847

Kesadaran akan pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia dan kesadaran akan pentingnya HAM muncul bersamaan dengan kesadaran akan pentingnya menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan (*human centred development*). HAM mengajarkan prinsip-prinsip universal persamaan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi, kekerasan terhadap sesama manusia, serta pembatasan dan pengekangan terhadap kebebasan dasar manusia.¹⁰ Nabi Muhammad pun telah mengimplementasikan prinsip-prinsip persamaan dan penghormatan kepada manusia dalam masyarakat Madinah yang heterogen dan tertuang dalam Piagam Madinah. Piagam tersebut secara umum menjelaskan lima hal yaitu prinsip persaudaraan, prinsip saling menolong, prinsip melindungi yang lemah dan teraniaya, prinsip saling menasehati dan prinsip kebebasan beragama.¹¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi hukum dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat terutama yang membutuhkan perlindungan hukum dan dijamin oleh Negara artinya setiap warga Negara sama di mata hukum ini menyatakan salah satu kaidah hukum. Asas persamaan kedudukan ini sangat penting ditegakkan terutama dalam kehidupan bermasyarakat.¹²

¹⁰Yahya Ahmad Zein, "Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam", *Veritas et Justitia* 1,No.1 (Juni 2015): h.93

¹¹Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi* (Jakarta:Naufan Pustaka, 2010), h.12

¹²Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006) , h.102.

Konsep pemasyarakatan pada awal pembentukannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan sebagai perwujudan pergeseran fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan, melainkan juga suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pemasyarakatan diarahkan untuk mengembalikan WBP sebagai warga Negara yang baik sekaligus melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh WBP, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Adapun yang dimaksud WBP adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.¹³

Kehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan bentuk dari konsekuensi hukuman atas perilaku melanggar hukum yang pernah dilakukan. Berbagai permasalahan dialami narapidana dalam menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan, diantaranya perubahan hidup, hilangnya kebebasan dan hak-hak yang semakin terbatas, hingga perolehan label penjahat yang melekat pada dirinya

¹³Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan*, h.2

serta kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan membuat mereka harus terpisah dari keluarga dan hidup bersama narapidana lain sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 dan 7 Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Adanya model pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan penjara pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Tentang lahirnya istilah lembaga pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat.

Model reintegrasi menganut paham bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus dapat memberikan bantuan pada masa transisi ketika pelanggar hukum kembali ke dalam masyarakat untuk menjadi warga masyarakat yang patuh hukum dan produktif. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, model reintegrasi yang ideal harus mengandung empat tahap, yaitu *prison based rehabilitation* (penjara berdasarkan rehabilitasi), *transitional service* (pelayanan transisi), *community after care* (pembinaan dalam masyarakat), *postsupervision certification as "normal"* (pembinaan akhir hingga dianggap telah mampu bermasyarakat dan mendapatkan hak-haknya sebagai warga masyarakat).¹⁴

¹⁴Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan*, h.19-20

Pada dasarnya, pola sistem pemasyarakatan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah banyak mengadopsi *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR). Salah satu konsep pemasyarakatan, dimana pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana atau anak pidana mengarah pada integrasi kehidupan di dalam masyarakat. Dalam konsideran Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan jelas dinyatakan bahwa penerimaan kembali oleh masyarakat serta keterlibatan narapidana dalam pembangunan merupakan akhir dari penyelenggaraan pemasyarakatan. Proses pembinaan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem pemenjaraan yang mengedepankan balas dendam dan efek jera.

Namun berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Nophilia pada tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Kendala dan Penyelesaiannya di LP Wanita Malang dan LP Wanita Blitar, menjelaskan bahwa terdapat hambatan-hambatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diantaranya adalah sarana gedung lembaga pemasyarakatan dan sarana pembinaan yang belum memadai dan terbatas sehingga hasilnya pun kurang memadai dan dibanding-bandingkan dengan barang yang diproduksi di luar Lapas (hasil produksi perusahaan). Hal ini mengakibatkan sifat pendidikan keterampilan disesuaikan dengan sarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan adanya keadaan tersebut, akibatnya banyak narapidana setelah keluar dari lembaga

pemasyarakatan tidak mempunyai bekal pendidikan atau keterampilan, karena pada waktu mengikuti latihan di Lembaga Pemasyarakatan tidak sepenuh hati dan hanya bersifat pengisi waktu saja, sehingga setelah keluar dari Lapas sulit mencari pekerjaan.¹⁵

Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar yaitu Menjadi penyelenggara Pemasyarakatan yang profesional dalam penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Visi tersebut mengandung pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan dalam kerangka memulihkan kembali kesatuan hubungan hidup dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat, makhluk Tuhan atau manusia mandiri dan produktif, melalui misi dan program kerja dalam rangka menyambut dan mendukung Reformasi Birokrasi Pemasyarakatan menuju Kebangkitan Pemasyarakatan ke dua, sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat terhadap kepastian hukum, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dalam penelitian ini penulis perlu membatasi fokus penelitian dan deskripsi fokus untuk menjaga agar penelitian ini tetap terarah. Adapun fokus penelitian dan deskripsi fokus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

¹⁵Eka Sari Dewi, "Implementasi Proses Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam", *Skrripsi* (Batam: UIB, 2012), h.30

Adapun fokus dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pemberdayaan Narapidana.
- b. Upaya Persiapan Kerja.
- c. Pasca Pembinaan.
- d. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

2. Deskripsi Fokus

a. Pemberdayaan Narapidana

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self reliance* atau kemandirian. Sedangkan narapidana merupakan terpidana yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

b. Upaya Persiapan Kerja

Upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya). Sedangkan persiapan kerja yang dimaksud pada penelitian ini adalah semua bentuk perlengkapan, persiapan dan perencanaan sebagai bentuk upaya dan usaha individu dalam mempersiapkan diri untuk bekerja mencari nafkah. Individu dalam hal ini adalah narapidana yang ada di di Lapas Kelas 1 Makassar.

c. Pasca Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang artinya membangun, mendirikan, mengusahakan agar mempunyai kemajuan lebih. Pembinaan sering dikaitkan dalam suatu proses perbaikan atau sistem dan cara merubah sesuatu ke arah yang lebih baik

dan bermakna. Pasal 1 PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan erilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

d. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Dalam Pasal 1 Ayat 3 UU Nomor 12 Tahun 1995, dijelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana peran Lapas Kelas 1 Makassar dalam pemberdayaan narapidana sebagai upaya persiapan kerja pasca pembinaan perspektif siyasah syar'iiyyah. Oleh karena itu, untuk mengarahkan pembahasan di atas maka penulis merumuskannya sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pemberdayaan narapidana melalui pembinaan sebagai upaya persiapan kerja di Lapas Kelas 1 Makassar ?

2. Bagaimana bentuk pemberdayaan narapidana sebagai upaya persiapan kerja pasca pembinaan di Lapas Kelas 1 Makassar?
3. Apa hambatan dalam proses pembinaan di Lapas Kelas 1 Makassar?

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini ada beberapa literature yang dijadikan acuan dasar yaitu :

1. Eko Riyadi, dalam bukunya *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, buku ini menjelaskan mengenai aspek hukum hak asasi manusia, mulai dari fondasi filosofis, pilar instrument, dan mekanisme implementasi dan pengawasannya. Buku ini menjangkau pembahasan dari instrumen internasional, regional dan nasional. Keistimewaan buku ini ada dua, yaitu pendekatan yang memadukan hukum internasional dan hukum nasional menjadi satu pembahasan utuh, dan runtutnya penulisan mulai dari aspek teoretik, instrument internasional, regional dan diakhiri dengan instrument nasional. Akan tetapi dalam buku ini tidak menjelaskan bagaimana Islam mengatur dan mengakomodir Hak Asasi Manusia.
2. Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, buku ini menjelaskan bagaimana Islam mengapresiasi nilai-nilai universal HAM, hak kebebasan beragama, hak asasi anak dan hak asasi perempuan. Salah satu tujuan dari buku ini adalah meluruskan kesalahpahaman sebagian masyarakat bahwa nilai-nilai HAM adalah produk barat yang di dalamnya ada kontradiksi

dengan nilai budaya Indonesia. Akibatnya, timbul resistensi, khususnya dari kelompok agama terhadap konsep HAM. Agama, khususnya Islam justru mengajak umatnya untuk memperlakukan manusia sebagai saudara, tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap sesama untuk alasan apapun. Namun dalam buku ini tidak menjelaskan secara lengkap bagaimana dasar-dasar HAM dalam Piagam Madinah yang juga mengakomodirnya.

3. A. Ahsin Thohari, dalam bukunya *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, yang dalam buku ini menjelaskan dasar-dasar seperti negara hukum, konstitusi, dan hak konstitusional. Buku ini juga menjelaskan pada awal-awal dikenalnya HAM, manusia mengenalnya sebagai seperangkat hak yang dimiliki oleh manusia dan tidak boleh diganggu gugat atas dasar sebagai manusia. Buku ini berguna untuk memberikan pengetahuan di dalam bidang filsafat hukum dan lebih khusus lagi filsafat hukum tata negara yang di dalamnya memasukkan topic kajian HAM. Namun dalam buku ini tidak menjelaskan bagaimana HAM dalam Islam serta bagaimana perlindungan hak-hak konstitusional itu secara lebih rinci.
4. Jimly Asshidiqie dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, menjelaskan tentang Hukum Tata Negara Umum dan Hukum Tata Negara positif. Penjelasan dimulai secara komprehensif dari sisi definisi, metode hingga pada pergeseran orientasi yang terjadi dalam corak keilmuan bidang hukum tatanegara dalam perkembangannya di Indonesia. Kemudian

dilanjutkan dengan penjelasan tentang konstitusi, sumber hukum tatanegara, penafsiran dan praktik hukum tatanegara, kekuasaan negara hingga hak asasi manusia. Namun dalam buku ini tidak dijelaskan terkait kajian hukum Islam terhadap perkembangan hukum tatanegara baik secara umum maupun hukum tatanegara positif Indonesia.

5. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, buku ini memberikan pengetahuan dasar, pengertian, dan pengantar dalam mempelajari hukum yang berlaku di Indonesia. Arti pentingnya suatu peraturan hukum terletak dalam hubungannya yang sistematis dengan keseluruhan peraturan-peraturan hukum lainnya sehingga sistem hukum pun harus dipelajari. Peraturan-peraturan hukum itu tidak ada yang lengkap dan tidak semuanya jelas sehingga hukumnya masih harus dicari. Penemuan hukum ini harus pula dipelajari jika mempelajari hukum. Akan tetapi buku ini tidak menjelaskan secara mendasar tujuan hukum dengan lebih mudah, yang lebih berorientasi pada hafalan bukan pada pemahaman, tidak ada penjelasan mengenai interferensi dan kontensi antara pendapat-pendapat ahli terdahulu yang diuraikan.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan umum yaitu untuk mengetahui peran Lapas Kelas 1 Makassar dalam pemberdayaan narapidana sebagai upaya

persiapan kerja pasca pembinaan perspektif siyasah syar'iyah. Berdasarkan tujuan umum penelitian maka dapat ditarik tujuan khusus sebagai berikut:

- a. Mengetahui urgensi pemberdayaan narapidana melalui pembinaan sebagai upaya persiapan kerja di Lapas Kelas 1 Makassar .
- b. Mengetahui bentuk pemberdayaan narapidana sebagai upaya persiapan kerja pasca pembinaan di Lapas Kelas 1 Makassar.
- c. Mengetahui hambatan dalam proses pembinaan di Lapas Kelas 1 Makassar

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoretis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan mengenai peran Lapas Kelas 1 Makassar dalam pemberdayaan narapidana sebagai upaya persiapan kerja pasca pembinaan perspektif siyasah syar'iyah.
 - 2) Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi terkait peran Lapas Kelas 1 Makassar dalam pemberdayaan narapidana sebagai upaya persiapan kerja pasca pembinaan perspektif siyasah syar'iyah.
- b. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal pemahaman mengenai Peran Lapas Kelas 1 Makassar dalam pemberdayaan narapidana sebagai upaya persiapan kerja pasca pembinaan perspektif siyasah syar'iyah.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Umum tentang Pemberdayaan Narapidana

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah *empowerment* berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga di akhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan. Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Ife (1995) menyatakan bahwa: *Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to 'work th system,' and so on.*¹

Definisi tersebut diatas mengartikan konsep pemberdayaan (*empowerment*) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Di sisi lain, Paul (1987) dalam Priyono dan Pranarka 1996) mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis

¹Agus Purbathin Hadi, Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan dalam Pembangunan, Yayasan Agribisnis/ Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA), (2009): h.

dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap “proses dan hasil pembangunan.” Sedangkan konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada pemberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.² Menurut Usman (2004), pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self reliance* atau kemandirian.³

Setelah menjalani waktu hukuman yang telah ditentukan, narapidana akan dibebaskan dan dapat berkumpul dengan keluarga serta berinteraksi dengan masyarakat. Akan tetapi stigma masyarakat yang muncul mengenai mantan narapidana merupakan tekanan dan beban yang amat berat. Tidak hanya itu, tetapi juga perilaku diskriminatif dari masyarakat yang diterima oleh mantan narapidana berupa sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan, kaarena ketidakpercayaan masyarakat untuk mempekerjakan seorang mantan narapidana.⁴

²Agus Purbathin Hadi, Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan dalam Pembangunan, *Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*, (2009): h. 1-2

³Anang Sugeng Cahyono, Pemberdayaan dan Pengembangan Keterampilan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung, *Bunorowo* 2, No.1 (2014): h. 4

⁴Luky Mudiarti dan Muhammad Zainuddin, Pemberdayaan Mantan Narapidana di Kabupaten Jepara Melalui Pelatihan Pengolahan Aneka Produk Perikanan, *Dispotek* 7, No.2 (Juli 2016):h. 14

Narapidana adalah manusia biasa yang kebetulan salah arah dalam perjalanan hidupnya, mereka memiliki Hak Asasi Manusia dan hak-hak mereka dilindungi oleh hukum. Meskipun mereka telah tersesat, tidak layak ditunjukkan pada narapidana bahwa mereka itu penjahat, sebaliknya, mereka harus selalu merasa bahwa mereka dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Oleh sebab itu upaya pemberdayaan dilakukan untuk memulihkan rasa percaya diri dan keyakinan mereka bahwa mereka dapat berkontribusi dalam ingkungan masyarakatnya. Pemberdayaan dilaksanakan dengan bertolak dari situasi ketidakberdayaan yang dialami oleh klien baik secara perorangan, kelompok, maupun komunitas. Ife (1995), mengemukakan “*empowerment aims to increase the power of disadvantage*”, yang berarti pemberdayaan itu dilakukan untuk memberikan atau meningkatkan kekuatan/ kemampuan kepada masyarakat lemah atau tidak beruntung.⁵

Tujuan pelaksanaan program pemberdayaan warga binaan, yaitu:

- a. Untuk menumbuhkan, membangkitkan dan berkemampuan serta memiliki rasa tanggungjawab terhadap dirinya maupun tugas-tugas yang dihadapinya.
- b. Agar warga binaan memiliki pengetahuan dan keterampilan sehingga mereka dapat menjadi manusia yang berdaya guna dan berhasil guna.⁶

⁵Anang Sugeng Cahyono, Pemberdayaan dan Pengembangan Keterampilan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung, *Bunorowo* 2, No.1 (2014): h. 3

⁶Anang Sugeng Cahyono, Pemberdayaan dan Pengembangan Keterampilan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung, *Bunorowo* 2, No.1 (2014): h. 4

Oleh karena itu pemberdayaan bagi narapidana sangat berpengaruh kepada kehidupan lanjutannya ketika masa pidananya telah berakhir. Pemberdayaan bagi narapidana seperti pada kemampuan kerjasama narapidana lainnya, penyelesaian tugas dengan tepat waktu atau kedisiplinan, peningkatan kreatifitas dan kemampuan manajemen kerja yang akan menjadi dasar dan pengalamannya ketika kembali ke masyarakat dan mencari pekerjaan kembali ketika masa tahanannya telah berakhir

2. Narapidana

a. Pengertian Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian⁷. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Narapidana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana Narapidana merupakan terpidana yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

⁷Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual* (Surabaya: Target Press, 2003), h. 53

b. Hak-Hak Narapidana

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional.⁸

Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut diatas. Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengikuti HAM, komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 238 KUHAP, serta diundangkannya UU Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemsarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁹

⁸Syahrudin, "Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri" *Disertasi* (Makassar: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2010) , h.11

⁹Aswanto, "Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia" *Disertasi* (Surabaya, Perpustakaan FH Unair, 1999), h. 149

Pada tahap pelaksanaan putusan, HAM menjadi hak narapidana tetap menjamin dan dilindungi oleh hukum yang bermakna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pasal 10 ICCPR ditegaskan bahwa semua orang yang kehilangan kebebasannya, diperlakukan secara berprikemanusiaan dan dengan rasa hormat mengenai martabat pribadi insan bawahannya. Sistem penjara harus didasarkan pada perlakuan tahanan-tahanan yang esensialnya adalah reformasi dan rehabilitasi sosial.

Materi HAM Napi yang terdapat pada pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan Napi yang menjalani hukuman (*Standard Minimum Rules For Treatment of Prisoner*, 31 Juli 1995), yang meliputi:

1. Buku register.
2. Pemisahan kategori Napi.
3. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi.
4. Fasilitas sanitasi yang memadai.
5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet.
6. Pakaian dan tempat tidur yang layak.
7. Makanan yang sehat.
8. Hak untuk berolahraga di udara terbuka.
9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi.
10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner.
11. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan.

12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana.
13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan.
14. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar.
15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik.
16. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama.
17. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga,
18. Pemberitahuan kematian, sakit dari anggota keluarga.¹⁰

Delapan belas materi HAM tersebut, dapat dilihat bahwa masih banyak aturan-aturan yang disepakati oleh masyarakat internasional yang dikeluarkan oleh PBB tentang perlindungan HAM Napi yang masih sangat mungkin untuk diadopsi ke dalam hukum normatif di Indonesia terkait dengan pemasyarakatan di Indonesia.

Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.

¹⁰Panjaitan dan Simorangkir, *Lapas dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 74

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.¹¹

c. Narapidana dalam Islam

Islam adalah agama rahmat semesta alam. Syariatnya berdiri untuk kemaslahatan umat manusia. Semua perbuatan manusia telah diatur dalam syariat hukum Islam. Islam hadir bukan hanya untuk umat manusia, tetapi untuk semua manusia. Dalam Islam, kemuliaan dan ketinggian derajat manusia bukan diukur dari harta dan jabatan, tetapi dari ketakwaan dan keimanan manusia itu sendiri. Hukum Islam masuk ke dalam semua ranah baik orang yang bebas maupun yang terpidana. Hukum Islam telah memberikan hak-hak bagi narapidana sebagaimana telah dimuat

¹¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bab 3, pasal 14

di dalam sumber-sumber hukum Islam itu sendiri, di antara hak-hak narapidana dalam hukum pidana Islam adalah:¹²

1. Melakukan ibadah kepada Allah

Allah swt. menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada-Nya. Di antara ibadah tersebut adalah salat dan puasa. Orang merdeka dan terpidana dibebani hukum syariat dengan syarat-syarat yang berlaku. Oleh karena itu, narapidana dalam hukum Islam harus diberikan hak untuk beribadah kepada Allah seperti diberi hak untuk dapat melakukan salat dan puasa pada masa tahanan.

2. Mendapat makanan dan minuman yang layak dan halal

Allah swt. Berfirman dalam QS al-Insan/ 76:8

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Terjemahnya:

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.¹³

Asbabunnuzul Ayat:

Diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir yang bersumber dari Ibnu Jarir bahwa kata *asiiron* (orang yang ditawan) dalam surat Al-Insan ayat 8 adalah tawanan

¹²Hana Mujahidah, "Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi* (Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019), h.53

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran Departemen Agama RI, 1980), h. 1004

musyrikin yang disiksa karena Rasulullah tidak mungkin punya tawanan kaum Muslimin. Ayat ini turun sebagai perintah kepada kaum Muslimin untuk memperlakukan tawanan dengan baik dan memberi makanan yang disukainya.

3. Mendapatkan pakaian yang bagus dan menutup aurat¹⁴

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ أَتَى بِأَسَارَى وَأُتِيَ بِالْعَبَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ فَمِصًّا فَوَجَدُوا قَمِيصَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَقْدُرُ عَلَيْهِ فَكَسَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ فَلَدَلِكَ نَزَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ الَّذِي أَلْبَسَهُ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يُكَافِيَهُ

Terjemahnya:

Berkata `Abd Allah bin Muhammad: berkata Ibn`Uyainah dari `Amr dan mendengar dia Jabir bin `Abd Allah ra. Ia berkata, “Pada hari perang badar, orang-orang musyrik yang tertawan dibawa (ke hadapan Nabi saw). Saat itu `Abbas dibawa dalam keadaan tidak memiliki baju. Maka Nabi saw. mencarikan sebuah baju panjang untuknya. Para sahabat mendapati baju panjang `Abd Allah bin Ubay bin Salul cocok untuk badan `Abbas bin `Abdal Muthalib. Maka Nabi saw. memberikan baju panjang `Abd Allah bin Ubay bin Salul kepada `Abbas bin `Abdal-Muthalib untuk ia pakai. Oleh karena itu, Nabi saw. melepaskan baju panjang beliau dan beliau kenakan kepada jenazah `Abd Allah bin Ubay (saat akan dimakamkan). Perawi Sufyan bin Uyainah berkata, `Abd Allah bin Ubay memiliki jasa kepada Nabi saw (dengan memberikan baju panjangnya kepada `Abbas bin `Abdal-Muthalib). Oleh karena itu, Nabi saw. membalas jasa kebaikan tersebut.” (HR. Bukhari, no. 3008).

¹⁴Hana Mujahidah, “Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi* (Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019), h.54

Kata “baju panjang” menunjukkan bahwa pakaian tersebut menutup aurat bagi seseorang lelaki. Diriwayatkan juga bahwa Rasulullah saw. Memerintahkan agar tawanan dari suku Hawazin diberi pakaian. Rasulullah memerintahkan seseorang untuk ke Makkah membeli pakaian untuk tawanan. Sehingga saat mereka bebeas, mereka mengenakan pakaian.

4. Mendapatkan tempat yang layak dan mulia

Pada masa Rasulullah, lapas tidak seperti saat ini. Akan tetapi, Islam berbeda dengan bangsa Romawi, Persia dan Yunani. Islam memberikan tempat yang layak bagi para tawanan. Paling tidak ada dua tempat bagi para tahanan pada awal-awal Islam. Pertama, masjid yaitu tempat paling mulia. Kedua, rumah-rumah para sahabat.

Di antara alasan tahanan/tawanan ditempatkan di masjid adalah agar mereka terus menyaksikan akhlak dan ibadah kaum Muslim. Karena hal tersebut sangat urgensi dalam memberikan doktrin positif dan membuka persepsi buruk yang selama ini tertanam dibenak dan pikiran tawanan terhadap Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, keimanan sedikit demi sedikit masuk kepada hati mereka. sebagaimana yang terjadi pada sahabat Tsumamah bin Utsal. Adapun penempatan di rumah para sahabat adalah sebagai pemuliaan untuk mereka. Karena bagaimana pun mereka adalah manusia yang harus dipenuhi hak-haknya.¹⁵

¹⁵Hana Mujahidah, “Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi* (Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019), h.56

Hasan al-Bashri mengatakan bahwa pernah tahanan dihadapkan kepada Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah menempatkan mereka di rumah para sahabat. Beliau berpesan kepada pemilik rumah “*ahsan ilaih*” (berbuat baiklah kepadanya). Mereka para tahanan tinggal di rumah mereka selama dua atau tiga hari.

5. Tidak ada penyiksaan dan diperlakukan dengan baik

Islam hadir dibawa oleh seorang hamba mulia dan memiliki misi keakhlaikan mulia (akhlaq al-karimah). Oleh karena itu, dalam hukum Islam, tidak ada satupun perintah untuk menyiksa sesama manusia baik merdeka, budak atau tahanan. Bahkan, terhadap hewan sekalipun diperintahkan manusia untuk berbuat ihsan. Karenanya, pada masa Rasulullah saw. para tahanan diperlakukan dengan baik dan tidak ada penyiksaan.¹⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Upaya Persiapan Kerja

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).¹⁷ Poerwadarminta mengatakan bahwa upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Peter Salim dan Yeni Salim mengatakan upaya adalah

¹⁶Hana Mujahidah, “Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi* (Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019), h.57

¹⁷Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jombang: Lintas Media, 2007), h. 568

bagian yang dimainkan oleh guru atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹⁸

Sedangkan persiapan berasal dari kata “siap” yang mendapat awalan per- dan akhiran –an. Berikut pengertian mengenai persiapan:

1. Perlengkapan dan persediaan (untuk sesuatu);
2. Perbuatan (hal dsb) bersiap-bersiap untuk mempersiapkan; tindakan (rancangan dsb) untuk sesuatu.”

Sedangkan pengertian kerja dalam KBBI diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan sesuatu yang dilakukan atau diperbuat dan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah, mata pencaharian”. Jadi dapat disimpulkan bahwa persiapan kerja adalah semua bentuk perlengkapan, persiapan dan perencanaan sebagai bentuk upaya dan usaha individu dalam mempersiapkan diri untuk bekerja mencari nafkah.

Islam mendidik para pengikutnya agar cinta bekerja serta menghargai pekerjaan sebagai kewajiban manusia dalam kehidupannya. Islam menganjurkan supaya bekerja, karena bekerja adalah latihan kesabaran, ketekunan, keterampilan, kejujuran, ketaatan, mendayagunakan pikiran, menguatkan tubuh, mempertinggi nilai perorangan serta masyarakat dan memperkuat ummat. Rasulullah Saw juga memberikan tuntunan dan anjuran kepada umatnya untuk berusaha dan bekerja. Sebagaimana Rasulullah bersabda:

¹⁸Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Modern English Press: 2005), h. 1187

حدثنا إبراهيم ابن موسى أخبرنا عيسى ابن يونس عن ثوري عن خالد ابن معدان عن المقدم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده و إن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده "

Terjemahnya:

"Berkata kepada kami Ibrahim ibn Musa bahwa Isa ibn Yunus menceritakan kepada kami dari Tsauri dari Kholid ibn Ma'dan dari al-Miqdam ra. bahwa Rasulullah saw bersabda: "Tiada seorang makan makanan yang lebih baik, kecuali dari hasil usahanya sendiri. Dan Nabi Allah Dawud as.juga makan dari hasil tangannya sendiri." (HR. al-Bukhari).¹⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Pasca Pembinaan

1. Pengertian Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata "bina" yang artinya membangun, mendirikan, mengusahakan agar mempunyai kemajuan lebih.²⁰ Pembinaan sering dikaitkan dalam suatu proses perbaikan atau sistem dan cara merubah sesuatu ke arah yang lebih baik dan bermakna. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan."²¹

¹⁹Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (Juz II, Beirut Libanon: Darul Kutub Al-Alamiah),h. 135

²⁰M.B. Ali Deli, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Bandung: Penabur Ilmu, 2000), h.82

²¹Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, Bab 1, Pasal 1

Pengertian pembinaan adalah seseorang tidak sekedar dibantu untuk mempelajari ilmu murni tetapi dipraktekkan. Tidak dibantu untuk mendapatkan pengetahuan tetapi pengetahuan untuk dijalankan. Dalam pembinaan orang terutama dilatih untuk mengenaal kemampuan dan mengembangkannya agar dapat memanfaatkannya secara penuh dalam bidang hidup atau kerja mereka. Oleh karena itu, unsur pokok dalam pembinaan adalah mendapatkan sikap, attitude, dan kecakapan maupun skill.²²

2. Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana dikenal dengan nama pemasyarakatan, mulai Dr. Saharjo, S.H. melontarkan gagasan merubah tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Gagasan Saharjo dirumuskan dalam prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana sebagai berikut:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari sebelum ia masuk lembaga.

²²Harvanyah Rosyidatul Wahidah, "Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Jombang Kelas IIB)", *Skripsi* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), h.16

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu semata hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik lembaga ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.²³

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Dalam pembinaan ada beberapa komponen pembinaan yaitu Pembina, yang dibina, materi pembinaan, tempat pembinaan, sarana pembinaan dan sejumlah komponen lainnya. Narapidana adalah subjek sekaligus objek pembinaan. Pembinaan narapidana tidak hanya pembinaan mental-spiritual saja (pembinaan kemandirian), tetapi juga pemberian pekerjaan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Penghargaan terhadap citra manusia menjadi dasar utama. Perubahan pandangan dalam memperlakukan narapidana di Indonesia tentunya didasarkan

²³A. Josias Simon R, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesi* (Bandung: Lubuk Agung, 2011), h.12

pada suatu evaluasi kemanusiaan yang merupakan wujud manifestasi Pancasila, sebagai dasar pandangan hidup bangsa yang mengakui hak-hak asasi narapidana. Menilik butir ketiga dari pemikiran Sahardjo di atas, ada suatu mata rantai yang harus jelas diperhatikan oleh para pembina maupun pemerintah yaitu bagaimana pembina itu mampu menghasilkan si narapidana yang tetap mempunyai mata pencaharian setelah keluar dari penjara.²⁴

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembinaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

- a. Pengayoman, bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna didalam masyarakat.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan, bahwa warga binaan mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membedakan orangnya.
- c. Pendidikan, bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing masing.

²⁴Eka Sari Dewi, "Implementasi Proses Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam", *Skrispsi* (Batam: UIB, 2012), h.54

- d. Pembimbingan, bahwa warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan juga dapat mendapat pembimbingan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian.
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia, bahwa warga binaan pemasyarakatan tetap diperlukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksud dari penempatan itu adalah memberi kesempatan kepada negara guna mmemperbaikinya melalui, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam lembaga pemsyarakatan warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia, seperti hak memperoleh kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi. Warga binaan tidak boleh di perlakukan di luar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, bahwa warga binaan masyarakat harus tetap di dekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu anak pidana harus tetap dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang

bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Asas-asas pembinaan pada prinsipnya mencakup 3 pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses, dan metode.

- a. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga negara yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku.
- b. Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berangsur.
- c. Sebagai metode berarti cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan.²⁵

Pasal 7 PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahapan pembinaan yaitu:

1. Tahap awal, yang dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) masa pidana. (Pasal 9 ayat 1)
2. Tahap lanjutan, yang meliputi:
 - a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana.

²⁵Romli Atmasasmita, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan* (Bandung: Rineka Cipta, 1996), h. 12

- b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana (Pasal 9 ayat 2).
3. Tahap akhir, yang dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan (Pasal 9 ayat 3).²⁶

Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, psikis, keahlian, keterpaduan, sedapat mungkin pula *financial* yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang berguna.

Pekerjaan narapidana dalam konsep pemasyarakatan adalah:

- a. Narapidana diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat.
- b. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak ia harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan darinya.
- c. Pekerjaan dan didikan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi jabatan atau negara.
- d. Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan nasional.

²⁶Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

- e. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
- f. Narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan tidak terbelakang.
- g. Perlu diusahakan agar narapidana mempunyai mata pencaharian, yaitu supaya disamping mendapat didikan berangsur-angsur mendapat upah untuk pekerjaannya.

3. Pembinaan Narapidana dalam Islam

Islam mengajarkan bahwa pelaksanaan hukuman terhadap narapidana tersebut juga memiliki tujuan untuk memelihara setiap individu, memelihara agamanya, dirinya, hartanya, dan keturunannya. Para ahli hukum Islam telah menjelaskan tentang penyariatatan penjara dan mayoritas mereka berpendapat tentang perlunya aspek pembinaan bagi narapidana yang sedang menjalankan hukumannya.²⁷

Sebagai lembaga yang bertujuan mengembalikan (*ruju'*) atau taubat seseorang sehingga menjadi manusia yang utuh kembali dan berguna bagi masyarakat, faktor pendidikan dan pengajaran dalam Lembaga Pemasyarakatan sangat penting. Dalam pandangan Islam, narapidana adalah sosok yang memerlukan bimbingan. Salah satu sebab seseorang melakukan tindak pidana adalah kelalaian dan ketidaktahuannya pengetahuan, dan pemahaman keagamaan

²⁷Jamaluddin Ancok, *Efektivitas Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1992), h. 15

akan meluruskan jalan pikiran dan menjauhkan dari kelalaian dan ketidaktahuan tersebut.²⁸

D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara, peraturan mengenai lapas sendiri diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.²⁹

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) dalam sistem peradilan pidana berfungsi memperbaiki terpidana (*the function of correction*) agar terpidana

²⁸Dwidja Priyatno, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: STBH Press, 2005), h. 79

²⁹Nurudin Muhammad, "Perlindungan Hukum Bagi Saksi *Justice Collaborator* di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lapas Lowokwaru Malang)", *Skripsi* (Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), h.24

kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (*return to a normal and productive life*) di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya. Dahulu, lapas disebut rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.³⁰

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahadjo pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.³¹ Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh almarhum Bapak Sahardjo, S.H. (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara.

Satu tahun kemudian, pada tanggal 27 April 1964 dalam konferensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah Pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti kepenjaraan. Pemasyaraakatan dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan

³⁰Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hal.126

³¹Sukendro,ddk, “Pemberian Pelatihan Olahraga Pada Penghuni Lapas Wanita Provinsi Jambi”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 31, No.2 (April- Juni 2016): h.55

untuk reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan.³²

2. Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan menitikberatkan usahanya kepada pemberian kesempatan kepada narapidana untuk menduduki kembali tempatnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berfungsi penuh melalui interaksi yang positif dengan nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Kedudukan, tugas, dan fungsi lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut, Lapas adalah unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- b. Lapas mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan.
- c. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lapas mempunyai fungsi sebagai berikut: melakukan pembinaan narapidana/ anak didik, melakukan bimbingan sosial, kerohanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan tata usaha dan rumah tangga.³³

³²Nurudin Muhammad, “Perlindungan Hukum Bagi Saksi *Justice Collaborator* di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lapas Lowokwaru Malang)”, *Skripsi* (Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), h.25

³³Ilham Suyuti Ikhsan, “Analisis Hukum Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017),h. 50

Berdasarkan pada surat keputusan Menteri Kehakiman RI No. M-01.-PR.07.03 tahun 1985 dalam Pasal 4 ayat (1) tersebut, lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 kelas yaitu:

- 1) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I
- 2) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A
- 3) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menurut Departemen Hukum dan HAM RI adalah unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana yang ada di dalamnya.³⁴



³⁴Ilham Suyuti Ikhsan, “Analisis Hukum Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017),h. 50

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* (kualitatif lapangan) yang dalam penelitian hukum disebut penelitian empiris. Metode kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Sedangkan Connole, memberikan batasan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memfokuskan pada kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui interpretasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna dan keyakinan, dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat tentang peristiwa kehidupan.¹ Alasan peneliti memilih Lapas Kelas 1 Makassar sebagai lokasi penelitian disebabkan karena Lapas Kelas 1 Makassar merupakan Lapas terbesar di Indonesia Timur dengan perangkat pembinaan yang lebih maju dan berkembang.

¹Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), h. 44

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terkhusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada mulanya berlokasi di Jalan Ahmad Yani Makassar dan pada tahun 1975 akibat perluasan kota akhirnya pindah ke lokasi yang baru yakni di Jalan Sultan Alauddin no. 191 Makassar. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar berdiri diatas tanah seluas 94.069 m². Luas bangunan 20.000 M², dan bangunannya sudah mengalami beberapa renovasi yang terakhir 2007 yakni penambahan gedung kantor bagian depan. Sedangkan Tanah pertanian untuk pembinaan seluas 15.000 M².

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Normatif (syar'i) yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan syariat Islam seperti al-Qur'an dan hadis yang relevan dengan masalah yang dibahas.
2. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang dimaksud untuk melihat aturan-aturan yang berlaku dalam kodifikasi hukum kemudian merelevansikannya dengan masalah yang dibahas.

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder

1. Data Primer atau data dasar (*Primary data* atau *basic data*). Data Primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.
2. Data sekunder (*Secondary data*). Mencakup dokumen resmi, buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya.²

D. Metode Pengumpulan Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan bahan pustaka dan wawancara.

1. Bahan pustaka yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan yang relevan dan menunjang penelitian ini baik melalui buku, jurnal dan lain sebagainya.
2. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³ Wawancara akan dilakukan kepada Pegawai Lapas Kelas 1 Makassar sebanyak 4 orang dan warga binaan sebanyak 1 orang yang dengan wawancara ini akan diperoleh informasi mengenai pemberdayaan narapidana di Lapas Kelas 1 Makassar.

²Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 12.

³Esterbg, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2002), h.97

E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk melihat gejala-gejala sosial yang terjadi di lapangan. Instrumen pengumpulan data berfungsi sebagai alat untuk memperoleh data-data yang akan diteliti. Adapun instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Peneliti dalam hal ini peneliti juga termasuk instrumen dalam melakukan pengumpulan data sebab penelitalah yang akan mengolah data-data untuk kemudia dijadikan sebagai gagasan baru.
2. Narasumber adalah individu atau sekelompok orang yang menjadi sumber data daripada penelitian yang dilakukan.
3. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari narasumber yang berupa daftar pertanyaan.
4. Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data yang dianggap penting.
5. Kamera berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan narasumber, dengan adanya foto dan rekaman ini maka dapat meningkatkan keabsahan akan lebih terjamin.
6. Telepon genggam berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan narasumber. Penggunaan telepon genggam dalam

wawancara perlu memberi tahu kepada informan apakah dibolehkan atau tidak.

F. Teknik Pengolaan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

a. Klasifikasi Data (Memilah-milih data)

Klarifikasi adalah kata serapan dari bahasa Belanda, *classificae*, yang sendirinya berasal dari bahasa Prancis *classification*. Istilah ini menunjukkan kepada sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis atau menurut beberapa aturan atau kaidah yang telah diterapkan.

b. Reduksi Data (Mengurai data)

Dalam analisis data penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992) sebagaimana diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan di lapangan.

c. Editing data (Mengedit data yang salah)

Editing data yaitu tahap pemeriksaan data yakni proses peneliti memeriksa kembali data yang telah terkumpul untuk mengetahui cukup baik dan dapat diolah dengan baik.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder dan data primer, yaitu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menemukan isi atau makna aturan hukum.

G. Pengujian Keabsahan Data

Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmuan data penelitian maka suatu penelitian dituntut agar bisa memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh kesimpulan yang objektif, artinya bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi standar objektifitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data penelitiannya. Dalam menguji suatu keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil penelitian, peneliti dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian, pengamatan yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan triangulasi.

Triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁴ Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber data penelitian.

⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h.330

BAB IV

PEMBERDAYAAN NARAPIDANA DI LAPAS KELAS 1 MAKASSAR

SEBAGAI UPAYA PERSIAPAN KERJA PASCA PEMBINAAN

PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Lapas Kelas 1 Makassar

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dimana termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Sulawesi selatan yang bertugas memberikan perawatan dan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), baik yang bersifat teknis *substantif* maupun *administratif*.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada mulanya berlokasi di Jalan Ahmad Yani Makassar dan pada tahun 1975 akibat perluasan kota akhirnya pindah ke lokasi yang baru yakni di jalan Sultan Alauddin no. 191 Makassar. Kondisi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar secara umum masih memenuhi persyaratan. Dilihat dari segi keamanan, tembok bangunan kokoh, tembok keliling berikut pagar besi dan kawat berduri dalam kondisi baik, pos-pos pengamanan seperti pos atas masih dalam kondisi baik.

Lapas kelas I Makassar dalam melaksanakan visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yakni Terwujudnya warga binaan pemasyarakatan yang mandiri

dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib Pemasyarakatan. Dengan diiringi Misi :

1. Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap tahanan, narapidana, anak dan klien pemasyarakatan,
2. Mengembangkan pengelolaan pemasyarakatan dan menerapkan standar pemasyarakatan berbasis IT,
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat,
4. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja yang bersih dan bermartabat.
5. Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan pemasyarakatan.

Adapun sasaran pembinaan dan pembimbingan WBP di Lapas Kelas I Makassar itu sendiri yaitu meningkatkan kualitas WBP yang awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, seperti :

1. Kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kualitas Intelektual
3. Kualitas sikap dan perilaku
4. Kualitas profesional/keterampilan
5. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani

Itu semua pada dasarnya demi terwujudnya pelaksanaan sistem Pemasyarakatan dengan menyisipkan target menurunnya angka pelarian dan gangguan keamanan dan ketertiban, Meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi, Semakin menurunnya angka residivis, Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan semakin berkurangnya sub kultur penjara, sehingga akan menghindari yang namanya over kapasitas.

Adapun pembagian ruangan yang terdapat didalam Lapas Kelas I Makassar antara lain :

- a. Ruang Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar
- b. Ruang Kantor bersantai
- c. Ruang Aula serbaguna
- d. Ruang kunjungan, pembinaan, dan keamanan
- e. Blok penghuni terdiri dari 9 blok (daya tampung 740 orang) :
- f. Tempat ibadah (Masjid, Gereja)
- g. Ruang Poliklinik
- h. Rumah sakit
- i. Ruang keterampilan kerja
- j. Pos jaga atas 6 unit
- k. Ruang dapur dan gudang

l. Lapangan dan sarana olah raga

m. Rumah dinas pegawai

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar berdiri diatas tanah seluas 94.069 m2. Luas bangunan 20.000 m2, dan bangunannya sudah mengalami beberapa renovasi yang terakhir 2007 yakni penambahan gedung kantor bagian depan. Tanah untuk pertanian untuk pembinaan seluas 15.000 M2.

B. Urgensi Pemberdayaan Narapidana Sebagai Upaya Persiapan Kerja Pasca Pembinaan di Lapas Kelas 1 Makassar

Upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia memang harus banyak digencarkan guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat dalam suatu Negara, termasuk untuk narapidana yang harus diberikan ekstra dalam meningkatkan mutu dan kualitasnya untuk tidak mengulangi kejahatan dan ikut serta dalam proses pembangunan. Oleh karena itu diperlukan upaya dari Lembaga Pemasyarakatan dalam membangun manusia seutuhnya yang ditunjang dengan program pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana merupakan program yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan yang difungsikan untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berinteraksi kembali dengan masyarakat secara baik dan bertanggung jawab setelah masa pidananya berakhir.

Hal tersebut sejalan dengan amanah Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar

menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut Mohamad Maulana, Kabid Pembinaan Lapas Kelas 1 Makassar, menjelaskan bahwa proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan sangat penting karena pemasyarakatan adalah proses pembinaan yang melibatkan warga binaan pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan dan masyarakat yang dalam hal ini minimal keluarga dari warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan ini dalam rangka memulihkan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang tercakup dalam proses pemasyarakatan.¹

Hubungan hidup yaitu bagaimana ia menjadi lebih baik dibandingkan sebelum melaksanakan masa pidananya dan setelah kembali ke masyarakat. Kehidupan yaitu menjaga hubungan baik ketika bersosialisasi dengan keluarga dan masyarakat nantinya, yang ketika masih melaksanakan pidananya mereka latihan bersosialisasi dengan sesama warga binaan, dengan petugas dan dengan masyarakat yang berkunjung ke Lapas. Sedangkan penghidupan yaitu bagaimana ketika setelah keluar dari Lapas dapat hidup produktif, mandiri dan tidak merepotkan orang lain. Proses pembinaan dalam rangka memulihkan proses hidup, kehidupan dan penghidupan ini, bertujuan:

¹Mohamad Maulana, Kabid Pembinaan Lapas Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 30 Juni 2020

1. Agar warga binaan menyadari kesalahannya.
2. Agar warga binaan tidak mengulangi perbuatannya.
3. Menjadi lebih baik setelah masa pidananya berakhir dan kembali ke masyarakat.
4. Menjadi manusia yang mandiri dan produktif.²

Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dua pembinaan, yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan narapidana dapat mandiri dan bekerja ketika masa pidananya telah berakhir karena telah dibekali selama berada di Lapas dengan pembinaan yang mencakup bidang mental dan keterampilan. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana khususnya pembinaan kemandirian juga sangat berguna bagi kehidupannya selanjutnya. Contohnya beberapa narapidana yang telah bebas dan dulunya bekerja sebagai pembuat roti di Lapas Kelas 1 Makassar, setelah bebas mereka menggunakan keahliannya tersebut untuk membuat usaha roti dan menjualnya ke masyarakat. Sehingga pembinaan tersebut berguna bagi narapidana sebagai bekalnya ketika bebas nantinya meskipun dalam pelaksanaan pembinaan tersebut awalnya harus ada sedikit pemaksaan yang wajar.³

Hal yang sama pun dijelaskan oleh Lia Novitasari, Staf Bimbingan Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Makassar, bahwa pembinaan kemandirian dan kepribadian ini sangat penting karena akan memberikan pengalaman bagi warga

²Mohamad Maulana, Kabid Pembinaan Lapas Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 30 Juni 2020

³Poerwanto Yuwono, Staf Bimpas Lapas Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 30 Juni 2020.

binaan. Seperti dalam pembinaan kemandirian yaitu perbengkelan, pencucian mobil, Garmen, dan sebagainya biasanya warga binaan yang mengikuti pelatihan-pelatihan akan diberikan sertifikat yang berguna untuk melamar pekerjaan ketika bebas nantinya.⁴

Menurut Arifin, Mantan Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Makassar, bahwa suatu kesyukuran karena telah mengikuti pembinaan di Lapas Kelas 1 Makassar. Karena dalam pelaksanaan pembinaan ini terdapat pelatihan-pelatihan seperti pelatihan pengelasan yang biasanya dilaksanakan selama sepekan dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi dirinya khususnya dalam hal pengelasan sehingga dapat menghasilkan produk seperti pengaman jendela maupun pagar. Selain itu, ketika bebas pun diterima sebagai pekerja di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai pengangkut sampah yang dalam pengurusannya dibantu dan direkomendasikan oleh pihak Kalapas kepada Camat Rappocini, Kota Makassar.⁵

Adapun menurut MA, Warga Binaan Lapas Kelas 1 Makassar menjelaskan bahwa pembinaan yang ada di Lapas Kelas 1 Makassar sangat berguna bagi kehidupannya ketika bebas. Segala pembinaan di Lapas Kelas 1 Makassar pun berjalan dengan baik dan warga binaan tidak perlu mengeluarkan dana sedikitpun untuk diberikan pelayanan dan pembinaan yang baik.⁶ Oleh karena itu, pembinaan ini

⁴Lia Novitasari, Staf Bimpas Lapas Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 10 Juli 2020.

⁵Arifin, Mantan Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 10 Juli 2020

⁶MA, Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 5 Februari 2020

dapat berhasil jika seluruh elemen yang terkait dapat melibatkan diri dengan baik yaitu warga binaan pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan dan masyarakat.

Sedangkan menurut BS, Warga Binaan Lapas Kelas 1 Makassar menjelaskan bahwa segala pembinaan yang didapatkan sangat berguna bagi kehidupannya nantinya dan dapat menjadi masyarakat yang baik kembali ketika kembali ke wilayah tempat tinggalnya. Dengan mengikuti pembinaan kemandirian di bidang pencucian mobil dan motor, hal ini dapat menjadikannya memiliki keahlian atau *skill* yang nantinya dapat berguna jika bebas sehingga dapat hidup mandiri dan membuka usaha sendiri. Karena, pada awal mengikuti kegiatan pembinaan ini, terlebih dahulu warga binaan di *training* selama dua minggu yang memberikan pengalaman bagi warga binaan.⁷

Hal yang senada pun dijelaskan oleh Laludi, Kabid Bimbingan Kerja Lapas Kelas 1 Makassar, bahwa pembinaan bagi narapidana khususnya pembinaan kemandirian sangat penting bagi warga binaan maupun Lapas sendiri. Karena jika pembinaan ini berhasil, maka hal ini dapat menjadi modal bagi warga binaan untuk dapat hidup mandiri di luar nantinya. Sedangkan bagi Lapas sendiri, jika program ini terlaksana maka hal ini menjadi keberhasilan lembaga yang memang menjadi program Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Pembinaan kemandirian ini memberikan keahlian kepada warga binaan yang dapat menjadi modal untuk

⁷BS, Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 10 Juli 2020

membuka lapangan pekerjaan dan dapat hidup mandiri ketika telah selesai melaksanakan masa pidananya.⁸

Dalam pelaksanaan pembinaan ini pun harus memperhatikan pemenuhan hak-hak warga binaan sesuai dengan amanat UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa narapidana berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan, mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu dan hak-hak lain yang ada dalam undang-undang tersebut.

Menurut Laludi, Kabid Bimbingan Kerja Lapas Kelas 1 Makassar, bahwa petugas pemasyarakatan atau pihak Lapas dalam pelaksanaan pembinaan wajib memperhatikan hak-hak narapidana sesuai dengan amanat UU Pemasyarakatan. Oleh karena itu, seluruh petugas di Lapas Kelas 1 Makassar sangat memperhatikan pemenuhan hak-hak narapidana ini khususnya dalam pembinaan kemandirian.⁹ Dalam pelaksanaan pembinaan pun semua warga binaan diperlakukan sama tanpa

⁸Laludi, Kabid Bimbingan Kerja, Lapas Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 10 Juli 2020

⁹Laludi, Kabid Bimbingan Kerja, Lapas Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 10 Juli 2020

dibeda-bedakan serta dilakukan pula pendekatan yang baik dengan warga binaan.¹⁰ Adapun menurut BS, Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Makassar, bahwa dalam pelaksanaan program pembinaan, warga binaan sudah dipenuhi segala hak-haknya dengan baik dan warga binaan pun mendapatkan perlakuan yang sama dari pegawai. Selain itu, warga binaan pun mendapatkah yang sesuai dengan apa yang dikerjakan. Seperti di pencucian mobil dan motor, biasanya warga binaan akan diberi upah Rp 90.000 perminggu sebagai upah atas pekerjaannya.¹¹

Hal ini sejalan dengan ajaran dalam Islam yang menunjukkan bahwa, kemuliaan dan ketinggian derajat manusia bukan diukur dari harta dan jabatan, tetapi dari ketakwaan dan keimanan manusia itu sendiri. Hukum Islam masuk ke dalam semua ranah baik orang yang bebas maupun yang terpidana. Islam menjunjung tinggi penghormatan dan pemenuhan hak-hak serta perlakuan yang baik kepada sesama manusia sekalipun ia sedang menjalani masa pidana atau menjadi narapidana. Islam pun mengakomodir hak-hak narapidana seperti beribadah, mendapatkan perlakuan yang baik, mendapatkan pengajaran dan pakaian yang layak serta hak-hak lain yang diajarkan oleh Rasulullah dalam memperlakukan narapidana.

C. Bentuk-Bentuk Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas 1 Makassar

Melalui fungsi pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan bukan saja sudah berubah dalam pola pembinaan yang dilakukan sekaligus juga sudah harus mengubah

¹⁰Lia Novitasari, Staf Bimpas Lapas Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 10 Juli 2020

¹¹BS, Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 10 Juli 2020

orientasinya dari lembaga konsumtif menjadi lembaga produktif. Pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan yang berbasis “*community base treatment*” pelaksanaannya selalu ditingkatkan melalui pendekatan mental meliputi pemulihan harga diri secara pribadi maupun sebagai warga negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena mereka di didik (dilatih) juga untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan.¹²

Untuk mengoptimalkan dan menguatkan penyelenggaraan pemsayarakatan guna mencapai tujuan pidana yaitu melakukan pembinaan agar narapidana tidak mengulang perbuatan hukum dan mendidik mereka agar memiliki keterampilan sosial dan berwirausaha yang didukung dengan situasi aman dan kondusif, perlu dilakukan penataan dan pembaharuan manajemen pemsayarakatan. Oleh karena itu Pemerintah melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan upaya pengoptimalan penyelenggaraan pemsayarakatan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemsayarakatan. Dimana, revitalisasi penyelenggaraan pemsayarakatan ini adalah suatu upaya mengoptimalisasi penyelenggaraan pemsayarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap Tahanan, Narapidana dan Klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti.

¹²Haryanto Dwiatmodjo, *Communiti Base Treatment Dalam Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemsayarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.14 No.1 januari 2014 hal 116

Pembinaan bagi warga binaan dilaksanakan melalui empat tahapan yakni orientasi, pembinaan lanjutan, asimilasi dan reintegrasi sosial. Pada awal pelaksanaan pembinaan tersebut, Petugas Pemasyarakatan melakukan pengamatan melalui assesment. Dari pengamatan tersebutlah diketahui minat dan bakat dari narapidana yang kemudian pembinaanya disesuaikan dengan minat dan bakat tersebut.¹³ Menurut Mohamad Maulana, Kabid Pembinaan Lapas Kelas 1 Makassar, Lapas Kelas 1 makassar berupaya untuk merubah narapidana menjadi lebih baik dan menjadi manusia yang mandiri serta produktif. Upaya tersebut dilakukan agar ketika masa pidananya berakhir, narapidana tidak merepotkan keluarga dan mengganggu stabilitas sosial di masyarakatnya.¹⁴

Upaya Lapas Kelas 1 Makassar dalam memberdayakan narapidana yang sedang menjalani masa pidana dapat dilihat dalam berbagai macam pembinaan yang ada di Lapas Kelas 1 Makassar. Secara umum pembinaan tersebut meliputi:

1. **Pembinaan Kepribadian :**

Pembinaan kepribadian mengarah pada pembinaan mental, spiritual, dan jasmani. Adapun bentuk-bentuk pembinaan kepribadian di Lapas Kelas 1 Makassar meliputi:

- a. Melaksanakan sholat taraweh berjamaah, tadarus dan ceramah agama.
- b. Mengadakan pelatihan dan praktik fardhu kifayah

¹³Mohammad Romadlon Afwan, Staf Bimbingan Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 5 Februari 2020

¹⁴Mohamad Maulana, Kabid Pembinaan Lapas Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 30 Juni 2020

- c. Pembukaan Pesantren selama bulan suci ramadhan tahun 2015
- d. Melaksanakan Ibadah rutin, sholat Dzuhur, Ashar dan Maghrib berjamaah.
- e. Ceramah agama seminggu 2 kali bagi muslim, hari Minggu bagi Nasrani.
- f. Peringatan Hari besar agama, baik Islam, Kristen, Hindu dan Budha
- g. Senam, dilakukan setiap hari kerja secara bergiliran.
- h. Olah raga permainan dilaksanakan setiap hari secara bergiliran dan pada sore hari gabungan dengan pegawai sekaligus sebagai pembinaan minat dan bakat.
- i. Asimilasi ke dalam dengan mengundang tamu untuk olah raga bersama.
- j. Pembinaan Minat dan Bakat olah raga/ ceramah/ pimpin doa.
- k. Pelaksanaan porseni antar warga binaan menyambut 17 Agustus dan refleksi akhir tahun¹⁵

Menurut Poerwanto Yuwono, Staf Bimbingan Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Makassar, menjelaskan bahwa pembinaan kepribadian dilaksanakan dengan mengajak beribadah seluruh narapidana. Bagi yang beragama Islam, Lapas Kelas 1 Makassar bekerjasama dengan Kemenag untuk melakukan penyuluhan agama setiap hari Selasa dan Rabu mulai pukul 09.00-11.00, dan melakukan pengajian ba'da dhuhur dan ashar. Sedangkan bagi yang beragama Nasrani diadakan ibadah hari Sabtu bagi yang Advent dan hari Minggu untuk yang Kristen Protestan. Sedangkan pembinaan yang bekerjasama dengan Kemenag diadakan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 14.00.¹⁶

¹⁵Data Lapas Kelas 1 Makassar

¹⁶Martha Karabua, Staf Bimbingan Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 5 Februari 2020.

Untuk memaksimalkan kegiatan pembinaan kepribadian tersebut, Lapas Kelas 1 Makassar menyediakan tempat-tempat ibadah dan lapangan olahraga sebagai sarana penunjang terlaksananya pembinaan tersebut. Selain itu secara jasmani, Lapas Kelas 1 Makassar pun melaksanakan kegiatan olahraga setiap hari bagi warga binaan yang pelaksanaannya dengan membagi jadwal untuk setiap blok hunian hingga blok H dan I.¹⁷

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian mencakup program pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja. Pada aktivitas ini, narapidana dikembangkan akan potensi, bakat dan minat yang dimiliki. Pengembangan ini ditujukan agar narapidana lebih memiliki *skill* dan lebih mengikuti akan perkembangan pengetahuan. Menurut Poerwanto Yuwono, Staf Bimbingan Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Makassar, menjelaskan bahwa semua pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Makassar diperuntukkan bagi warga binaan yang ingin merubah dan mengembangkan potensi dirinya sehingga mereka harus terlibat dalam pembinaan tersebut. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pembinaan tersebut petugas pun telah membuat absen khusus yang akan berpengaruh bagi pembinaan selanjutnya berupa integrasi seperti pengurusan Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan sebagainya yang

¹⁷Poerwanto Yuwono, Staf Bimbingan Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 30 Juni 2020.

jika absen tidak sesuai dengan skor yang ditentukan maka integrasi akan ditunda beberapa saat.¹⁸

Pembinaan kemandirian berfokus kepada pekerjaan bagi narapidana yang ada di Lembaga pemasyarakatan. Pembinaan kemandirian ini disesuaikan berdasarkan minat warga binaan dan bidang kerja yang ada. Misalnya bagi warga binaan yang berminat dengan perbengkelan diarahkan ke perbengkelan otomotif. Pembinaan kemandirian ini pula dilaksanakan dengan bekerja sama dengan pihak luar, seperti bekerja sama dengan Depnaker dalam hal pelatihan pengelasan yg dipeuntukkan bagi warga binaan. Selain itu, pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Makassar saat ini tengah dikembangkan pembinaan untuk proses penjahitan yang kedepannya akan dibuat MoU antara Lapas Kelas 1 Makassar dengan pihak ketiga dalam hal jahit menjahit mulai dari pemotongan bahan, penjahitan hingga selesai.¹⁹

Pelaksanaan pembinaan kemandirian ini dilakukan oleh bagian bimbingan kerja dengan banyak kegiatan yang akan menjadi bekal ketika bebas nantinya seperti pencucian mobil, pertanian/perkebunan, cukur rambut, pengelasan besi, mebelair yang telah menjual beberapa peralatan seperti kursi tamu, tempat tidur dan lemari, penjahitan yang bahkan dari luar pegawai telah banyak meminta

¹⁸Poerwanto Yuwono, Staf Bimbingan Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 30 Juni 2020.

¹⁹Poerwanto Yuwono, Staf Bimbingan Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 30 Juni 2020.

untuk dijahitkan dengan pembayaran yang sesuai, pembuatan roti dan donat yang telah dijual ke pengunjung dengan rasa yang tidak kalah dengan roti di luar.²⁰

Selain itu, lapas Kelas 1 Makassar juga menyediakan pendidikan kesetaraan yang diutamakan bagi warga binaan yang tidak dapat membaca dan menulis. Pendidikan kesetaraan ini pula diperuntukkan bagi warga binaan yang ingin merubah nasibnya dan memiliki ijazah sederajat yang dapat mereka pergunakan nantinya. Pada pelaksanaan pendidikan kesetaraan ini, Lapas Kelas 1 Makassar bekerja sama dengan Dinas Pendidikan termasuk dalam pelaksanaan Ujian Nasional. Ijazah yang didapatkan warga binaan pun setara dengan ijazah pendidikan kesetaraan pada umumnya.²¹

Kegiatan pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Makassar diantaranya yaitu pencucian mobil, pembuatan tempe yang sudah menghasilkan beberapa warga binaan yang mahir dalam pembuatan tempe sehingga dapat membuka usaha ketika bebas nantinya dan telah ada beberapa regenerasi pekerja di pabrik tempe tersebut. Selanjutnya di bidang pertanian pun telah menghasilkan banyak hasil tani khususnya sayur mayur seperti sawi dan kangkung yang sebagian besar memenuhi kebutuhan konsumsi warga binaan sendiri sesuai dengan jadwalnya. Sedangkan di bidang pengelasan narapidana pun telah mendapat pelatihan yang dibantu oleh pihak luar sehingga warga binaan sudah mahir dalam pembuatan perabot seperti

²⁰Poerwanto Yuwono, Staf Bimbingan Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 5 Februari 2020.

²¹Poerwanto Yuwono, Staf Bimbingan Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 30 Juni 2020.

meja, kursi. Selanjutnya pembinaan terbaru yaitu Garmen atau penjahitan konvensional yang bekerja sama dengan pihak ketiga dengan mempekerjakan 136 orang warga binaan dengan diberikan pelatihan khusus serta hasilnya akan dijual dipasaran.²²

Secara rinci pembinaan kemandirian bagi narapidana di Lapas Kelas 1 Makassar meliputi:

1. Melaksanakan pembinaan minat dan bakat keterampilan menjahit, bingkai dan tempat tissue bahan dari koran bekas dan lain-lain bagi WBP.
2. Melaksanakan pelatihan keterampilan servis elektronik dan merakit sound sistem.
3. Melaksanakan pelatihan mental social dan keterampilan mebelair .
4. Melaksanakan kerja sama dengan pihak ke tiga dalam usaha pertamanan.
5. Kerja sama dengan pihak ketiga produksi mebelair.
6. Membuat pembibitan ikan Tawar bekerjasama dengan Pemerintah Kota Makassar.
7. Membuat kerajinan tangan berupa miniature Rumah Kayu, kapal layar .
8. Membuat kerajinan miniature benda pusaka dan rumah adat bekerja sama dengan Dinas Pariwisata.
9. Keterampilan kerja membuat paping blok dan batako.
10. Pertukangan kayu dan mebelair.

²²Laludi, Kabid Bimbingan Kerja, Lapas Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 10 Juli 2020

11. Pembuatan produksi tempe dan tahu di dalam Lapas
12. Pengembangan bengkel las bekerjasama dengan pihak ketiga
13. Pelatihan keterampilan dibidang penjahitan
14. Pengembangan pertanian bekerjasama dengan Bank Indonesia, pendidikan selama satu tahun
15. Pelatihan pembibitan dan usaha perikanan bekerjasama dengan dinas perikanan kota Makassar.
16. Keaksaraan fungsional bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar
17. Pemberantasan buta huruf bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar
18. Perpustakaan bekerjasama dengan perpustakaan Kota Makassar dan Perpustakaan Propinsi Sulawesi Selatan
19. Pemberantasan buta huruf Al-Quran, setiap hari Senin s/d Kamis.
20. Pembinaan re-integrasi sosial melalui Asimilasi, Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), CMK dan pembebasan Bersyarat (PB). Yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.²³

Pemberdayaan narapidana dengan melakukan pembinaan dapat meningkatkan sifat kemandirian dalam dirinya sehingga ia bisa siap untuk melanjutkan kembali hidupnya di tengah masyarakat. Maka segala bentuk pembinaan di Lapas Kelas 1 Makassar dapat dikatakan sudah sangat membantu para narapidana dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Pembinaan ini telah memberikan banyak bekal

²³Data Lapas Kelas 1 Makassar

yang sangat bermanfaat bagi narapidana ketika mereka bebas dan kembali ke masyarakat untuk melanjutkan hidupnya kembali. Semua keahlian dan skill yang diberdayakan di Lapas Kelas 1 Makassar dapat mereka pergunakan untuk bekerja setelah mereka bebas sesuai dengan keahliannya masing-masing.

D. Hambatan dalam pemberdayaan narapidana sebagai upaya persiapan kerja pasca pembinaan di Lapas Kelas 1 Makassar.

Kegiatan pembinaan yang menjadi faktor utama dan poros sekaligus titik tolak berhasil atau tidaknya suatu sistem Pemasyarakatan ini juga memiliki keterbatasan. Seperti yang kita ketahui jika pembinaan tidak berjalan maka akan sangat memancing keadaan yang aroganis, hidup berdasar komunitas, yang pada akhirnya memunculkan gesekan-gesekan yang nantinya dapat memicu terjadinya gangguan ketertiban yang sangat berarti. Akan tetapi melakukan pembinaan bagi warga binaan bukanlah hal yang mudah dan merupakan tantangan dari waktu ke waktu setiap Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia.

Dalam melaksanakan Sistem Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar ini sudah dapat melaksanakan dan menerapkan apa yang seharusnya diterapkan, baik oleh petugas maupun WBP. Namun, pembinaan yang dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak selamanya berjalan dengan mulus. Hal ini disebabkan karena masih adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pembinaan narapidana. Menurut Laludi, Kabid Bimbingan Kerja Lapas Kelas 1 Makassar, bahwa secara umum hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pembinaan itu sendiri diantaranya:

1. Kurangnya pegawai di Lapas Kelas 1 Makassar yang memiliki keahlian untuk menjadi instruktur dalam pembinaan sehingga selalu bergantung dengan pihak ketiga atau pihak luar.
2. Banyaknya bakat warga binaan yang sebagian tidak tersalurkan disebabkan karena anggaran yang kurang memadai.
3. Kurangnya perhatian dari masyarakat dan pemerintah setempat yang mengambil bagian di pembinaan di Lapas.²⁴

Menurut Poerwanto Yuwono, Staf Bimbingan pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Makassar menjelaskan bahwa pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas 1 Makassar secara umum tidak terdapat hambatan yang besar. Selain itu dari segi sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pembinaan pun sudah cukup memadai. Serta pemberian anggaran untuk pelaksanaan pembinaan ini pun telah dianggap cukup. Hanya saja, di bidang pendidikan keaksaraan, PKBM Lapas Kelas 1 Makassar kekurangan tenaga pendidik disebabkan karena komposisi petugas pemasyarakatan di Lapas ini tidak ada yang memiliki latar belakang pendidikan yang berasal dari sertifikasi sepadan guru. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembinaan ini, pihak Lapas Kelas 1 Makassar bekerja sama dengan pihak luar seperti Dinas Pendidikan, Kemenag, Depnaker, dan sebagainya sehingga petugas terkadang tidak terlibat banyak dalam proses pembinaan atau hanya sebagai fasilitator dan pengawas pelaksanaan pembinaan tersebut.

²⁴Laludi, Kabid Bimbingan Kerja, Lapas Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 10 Juli 2020

Kemudian yang menjadi tantangan bagi petugas pemasyarakatan diantaranya membangkitkan kemauan dari warga binaan untuk mengikuti kegiatan pembinaan tersebut. Karena secara umum jika petugas tidak sedikit memaksakan untuk mengikuti, maka warga binaan akan terlena dan menghabiskan waktunya dengan aktivitas yang tidak produktif seperti tidur dan bermalas-malasan. Oleh karena itu, petugas pemasyarakatan melakukan upaya yang sedikit memaksa seperti pelaksanaan ibadah bagi agama masing-masing, olahraga secara bergiliran dan pemberian absen kehadiran dalam kegiatan pembinaan. Absen kehadiran ini pun akan berpengaruh bagi pengurusan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan sebagainya.²⁵

Hal yang senada pun dijelaskan Lia Novitasari, Staf Bimbingan Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Makassar, bahwa yang menjadi hambatan lebih kepada rendahnya kemauan narapidana dalam mengikuti program pembinaan. Hal ini disebabkan karena warga binaan masih beranggapan bahwa untuk apa mengikuti kegiatan pembinaan atau bekerja di Lapas jika nantinya ketika bebas mereka akan sulit diterima kembali oleh masyarakat. Hal inilah yang diupayakan oleh petugas Lapas Kelas 1 Makassar untuk membangkitkan minat warga binaan mengikuti pembinaan baik kemandirian maupun kepribadian.²⁶

Sedangkan menurut Emmang, mantan narapidana Lapas kelas 1 Makassar menjelaskan bahwa dalam mengikuti semua rangkaian pembinaan di Lapas Kelas 1

²⁵Poerwanto Yuwono, Staf Bimbingan Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 30 Juni 2020.

²⁶Lia Novitasari, Staf Bimpas Lapas Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 10 Juli 2020.

Makassar ia tidak mendapatkan hambatan-hambatan yang menghambat dirinya. Semua petugas pun bersikap baik dan adil dalam memberikan pelayanan apalagi ketika narapidana ini berkelakuan baik, maka petugas tentu akan lebih baik.²⁷ Hal yang sama pun dijelaskan MA, Warga Binaan Lapas Kelas 1 Makassar menjelaskan bahwa pembinaan di Lapas Kelas 1 Makassar pun berjalan dengan baik dan warga binaan tidak perlu mengeluarkan dana sedikitpun untuk diberikan pelayanan dan pembinaan yang baik sehingga dalam pelaksanaannya tidak terdapat hambatan yang berarti.²⁸

Pada pelaksanaan pembinaan dimanapun, hambatan pasti selalu ada. Akan tetapi, Lapas Kelas 1 Makassar telah memiliki konsep untuk mengubah orang yang awalnya tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Jika dilandasi dengan niat yang tulus dan ikhlas maka tujuan akhir yang hendak dicapai akan terwujud. Sehingga hambatan kecil yang ditemui maka dianggap sebagai tantangan yang akan didapatkan solusinya.²⁹

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program pembinaan di Lapas Kelas 1 Makassar yaitu pelaksanaan pembinaan tersebut tidak menemui kendala yang begitu besar baik dari segi sarana maupun anggaran yang umumnya ditemui di beberapa Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Hambatan yang didapatkan diusahakan untuk didapatkan jalan keluarnya dengan berbagai cara dan kerjasama

²⁷Emmang, Mantan Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 27 Juli 2020

²⁸MA, Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 5 Februari 2020

²⁹Mohamad Maulana, Kabid Pembinaan Lapas Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 30 Juni 2020

oleh pihak Lapas Kelas 1 Makassar. Oleh karena itu, dari berbagai hambatan-hambatan tersebut selalu dapat diatasi dan pelaksanaan program pembinaan ini dapat berjalan dengan lancar serta dapat memberikan sumbangsih bagi persiapan narapidana ketika ia telah selesai melaksanakan masa pidananya dan kembali ke masyarakat secara bebas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian serta analisa yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan sangat penting karena pemasyarakatan adalah proses pembinaan yang melibatkan warga binaan pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan dan masyarakat yang dalam hal ini minimal keluarga dari warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan ini dalam rangka memulihkan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang tercakup dalam proses pemasyarakatan. Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan narapidana dapat mandiri dan bekerja ketika masa pidananya telah berakhir karena telah dibekali selama berada di Lapas dengan pembinaan yang mencakup bidang mental dan keterampilan. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana khususnya pembinaan kemandirian juga sangat berguna bagi kehidupannya selanjutnya. Dalam pelaksanaan pembinaan ini diperhatikan pula pemenuhan dan penghormatan hak-hak narapidana yang tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan hak-hak yang ditetapkan dalam ajaran Islam.
2. Untuk mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan dilakukan dua pembinaan, yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Dimana

pembinaan kepribadian mengarah pada pembinaan mental, spiritual, dan jasmani. Pembinaan kemandirian mencakup program pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja. Pada aktivitas ini, narapidana dikembangkan akan potensi, bakat dan minat yang dimiliki. Pengembangan ini ditujukan agar narapidana lebih memiliki *skill* dan lebih mengikuti akan perkembangan pengetahuan.

3. Dalam melaksanakan Sistem Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar ini sudah dapat melaksanakan dan menerapkan apa yang seharusnya diterapkan, baik oleh petugas maupun WBP. Namun, pembinaan yang dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak selamanya berjalan dengan mulus. Hal ini disebabkan karena masih adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pembinaan narapidana seperti keinginan narapidana sendiri untuk mengikuti pembinaan dan kurangnya tenaga pendidik untuk pendidikan kesetaraan.

B. Implikasi Penelitian

Bertolak dari temuan penelitian tentang Peran Lapas Kelas 1 Makassar dalam pemberdayaan narapidana sebagai upaya persiapan kerja pasca pembinaan perspektif siyasah syar'iyah, maka yang menjadi rekomendasi yaitu:

1. Pentingnya penguatan kerjasama dari beberapa elemen penting dalam proses pembinaan seperti petugas pemasyarakatan dan masyarakat/pemerintah untuk lebih mempromosikan secara massif segala produk-produk yang dihasilkan dari pembinaan kemandirian bagi narapidana agar produk yang dihasilkan oleh Lapas

Kelas 1 Makassar juga dapat bersaing dan diperhitungkan oleh masyarakat luar Lapas.

2. Pelaksanaan program pembinaan agar lebih kreatif dan inovatif agar pembinaan tersebut berjalan efektif dari sebelumnya serta dapat lebih meningkatkan minat warga binaan untuk mengikuti rangkaian kegiatan secara sukarela.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ancok, Jamaluddin, *Efektivitas Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1992.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Atmasasmita, Romli, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasayarakatan*. Bandung: Rineka Cipta, 1996.
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*. Surabaya: Target Press, 2003.
- Deli, M.B. Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Penabur Ilmu, Bandung, 2000.
- Esterbg. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Fitrah, Muh. dan Luthfiyah. *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak, 2017.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Jakarta: Al- Jamatul Ali, Seuntai Sejarah yang Maha Luhur, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mulia, Musdah. *Islam dan Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Naufan Pustaka, 2010.
- Panjaitan dan Simorangkir, *Lapas dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Priyanto, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006

Qurbani, Zainul Abidin. *Islam Hak Asasi Manusia Sebuah Kajian Komprehensif*. Jakarta: Citra, 2016.

Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Simon R, A. Josias, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.

Soekanto, Soejarno. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Undang-Undang

Republik Indonesia, Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*

Republik Indonesia, Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan*.

Jurnal

Arivani, Devira dan Muhammad Syafiq. "Menjadi Tahanan Pendamping Narapidana: Motivasi dan Dampaknya Terhadap Perubahan Diri". *Jurnal Penelitian Psikologi* 06, No.03 (2019)

Asshiddiqie, Jimly. "Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya" (Makalah yang disajikan pada Acara Dialog Publik dan Konstitusi Nasional Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah Tantangan dan Penyikapan Bersama, Jakarta, (2007)

Cahyono, Anang Sugeng. "Pemberdayaan dan Pengembangan Keterampilan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung". *Bunorowo* 2, No.1 (2014)

- Hadi, Agus Purbathin. "Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan dalam Pembangunan, *Yayasan Agribisnis/ Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*", (2009)
- Jahada. "Hak Asasi Manusia Menurut Al-Quran". *Jurnal Al-Adl* 6. No.1 9 (Januari 2013)
- Maulana, Prastin dan Panca Kursistin Handayani. "*Psychological Well Being* Narapidana Lapas Klas IIA Jember Yang Menjadi Tahanan Pendamping". *Insight* 11, No.1 (April 2015)
- Mudiarti, Luky dan Muhammad Zainuddin. "Pemberdayaan Mantan Narapidana di Kabupaten Jepara Melalui Pelatihan Pengolahan Aneka Produk Perikanan". *Dispotek* 7, No.2 (Juli 2016)
- Soetandyo, Wignjosoebroto. "Hak Asasi Manusia: Perkembangan Pengertiannya Yang Merefleksikan Dinamika Sosial-Politik". *Th* 12, No.4 (Oktober 1999)
- Sukendro,ddk. "Pemberian Pelatihan Olahraga Pada Penghuni Lapas Wanita Provinsi Jambi". *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 31, No.2 (April- Juni 2016)
- Zein, Yahya Ahmad. "Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam". *Veritas et Justitia* 1, No.1 (Juni 2015)

Skripsi dan Disertasi

- Aswanto, "Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia" *Disertasi*. Surabaya, Perpustakaan FH Unair, 1999.
- Dewi, Eka Sari, "Implementasi Proses Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam", *Skripsi*. Batam: UIB, 2012.
- Ilham Suyuti Ikhsan, "Analisis Hukum Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar". *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017.
- Muhammad, Nurudin, "Perlindungan Hukum Bagi Saksi *Justice Collaborator* di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lapas Lowokwaru Malang). *Skripsi*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.

Mujahidah, Hana, “Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*. Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019.

Syahrudin, “Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri” *Disertasi* . Makassar: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2010.

Wahidah, Harvaniyah Rosyidatul, “Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Jombang Kelas IIB)”, *Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.



LAMPIRAN



Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Kelas 1 Makassar



Wawancara dengan Staf Bimbingan Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Makassar



Wawancara dengan Kabid Bimbingan Kerja Lapas Kelas 1 Makassar



Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Makassar

RIWAYAT HIDUP



Andi Nur Mayapada, dilahirkan di Bulukumba, pada tanggal 3 Januari 1999, merupakan anak dari Ayahanda Andi Ahmad Patta, S.Sos dan Ibunda Andi Sayati, penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Lambongan, Kab. Kep. Selayar, setelah tamat di SD pada tahun 2010, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 5 Bontomatene, Kab. Kep. Selayar hingga tahun 2013, kemudian pada tahun tersebut penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bulukumba hingga tahun 2016, setelah tamat penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) pada tahun 2016, di Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah). Selama proses perkuliahan penulis pernah berkecimpung di dunia organisasi diantaranya Alauddin Debate Association (AlDebA) dan mengikuti beberapa lomba debat selama jenjang pendidikan. Kemudian penulis menyelesaikan studi dengan skripsi yang berjudul "Peran Lapas kelas 1 Makassar Dalam Upaya Pemberdayaan Narapidana Sebagai Upaya Persiapan Kerja Pasca Pembinaan Perspektif Siyasah Syar'iyah".